

Peranan BUMDes sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Good Governance serta Pengembangan Potensi Ekonomi Desa (Studi Kasus pada BUMDes Balung Kulon)

Arif Hidayatullah^{1*}, Siti Anisa²

¹ Program Studi Komputer Akuntansi, Akademi Komunitas Nurul Jadid, Jember, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Tata Rias, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Peranan BUMDes sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Good Governance dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Desa. Faktor yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini meliputi pembentukan BUMDes, unit usaha BUMDes, keunggulan dan permasalahan BUMDes, tata kelola BUMDes serta peranan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang serta mengidentifikasi peranan BUMDes dalam pelaksanaan program kesejahteraan Masyarakat desa melalui *Good Governance*. Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada BUMDes desa Balung Kulon pada tahun 2025 sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang dapat menjadi masukan bagi BUMDes tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Laporan keuangan BUMDes tahun 2020, sementara data primer didapatkan dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan BUMDes Balung Kulon dalam pelaporan keuangannya sudah lumayan bagus dengan pengelolaan yang baik. Unit usaha BUMDes ini juga berperan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan potensi desa. BUMDes Balung Kulon mempunya peranan yang cukup baik dalam pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa kepada masyarakat lokal.

Kata Kunci: BUMDes, Potensi Desa, Peranan BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to discuss the role of BUMDes as an effort to improve community welfare through good governance in developing village economic potential. The factors discussed in this study include the formation of BUMDes, BUMDes business units, BUMDes advantages and problems, BUMDes governance and the role of BUMDes. This study was conducted to re-examine and identify the involvement of BUMDes in enhancing community welfare through good governance. The focus of the research conducted in this study was on the BUMDes of Balung Kulon village in 2025 so that it is expected to obtain results that can be input for the BUMDes. The type of research used is qualitative research with an interpretative paradigm. The data sources for this study use primary and secondary data. Secondary data were obtained from the BUMDes financial report in 2020, while primary data were obtained from interviews. The results of this study indicate that the Balung Kulon BUMDes in its financial reporting is quite good with good management. This BUMDes business unit also plays a role in helping improve community welfare and develop village potential. The Balung Kulon Village-Owned Enterprise (BUMDes) plays a significant role in village development by leveraging village potential for the local community.

Keywords: BUMDes, Village Potential, Role of BUMDes, Community Welfare.

Korespondensi:

Arif Hidayatullah
(hidayatarief42@gmail.com)

Submit: 19-11-2025

Revisi: 30-12-2025

Diterima: 01-01-2026

Terbit: 15-01-2026



1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang mayoritas modal usaha bersumber dari desa melalui mekanisme penyertaan secara langsung yang bersumber dari pemisahan kekayaan desa sebagai dasar pengelolaan aset dan layanan kepada masyarakat, juga menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Desa memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan, sehingga kondisi dan perkembangan desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya stabilitas nasional (Edy Yusuf et. al, 2016). Selain itu, desa dipandang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi basis dalam mengidentifikasi permasalahan masyarakat hingga perumusan perencanaan dan pelaksanaan tujuan negara (Sidik, 2015). Dengan menggunakan desa sebagai sarana pembangunan, tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat dicapai dan diatasi melalui pembangunan desa (Sirejeki, 2015).

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan Masyarakat setempat berdasarkan budaya setempat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan wilayah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan serta mengelola aspek pemerintahan serta kepentingan warga local, berlandaskan inisiatif warga, hak-hak yang berasal dari asal-usul serta tradisi yang memperoleh pengakuan hukum serta yang memperoleh penghormatan pada kerangka struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai komponen dalam suatu negara, desa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Pembangunan dalam bentuk fisik maupun pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal (Anggraeni, 2016). Namun, perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan Kawasan perkotaan. Sebagai Upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan dua strategi utama, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendorong perubahan serta mencegah terjadinya permasalahan yang tidak diharapkan; dan kedua, adanya kemauan politik (*political will*) serta kapasitas pemerintah desa serta masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan (Bachrein, 2010). Sementara tujuan dari BUMDes sendiri yaitu mengoptimalkan asset-aset yang dimiliki desa serta mengembangkan ekonomi desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya (Sulistyo, et.al, 2020).

Keberadaan BUMDes diproyeksikan sebagai instrument penguatan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena bisa menjadi langkah awal masyarakat dalam melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan potensi desanya. Namun, mengingat keberadaan BUMDes masih tergolong baru, berbagai kendala justru muncul pada tahap pembentukannya (Ridlwan, 2014). Salah satu permasalahan utama adalah belum tersedianya dasar hukum yang kuat sebagai landasan eksistensi BUMDes di tingkat desa. Meskipun secara implisit upaya pelembagaan BUMDes telah diamanatkan melalui UU No. 8 Tahun 2005 sebagai regulasi amandemen terhadap UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab VII subbagian kelima, ditegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk BUMDes yang disesuaikan oleh kebutuhan serta potensi local desa sebagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme pendirian dan pengelolaan BUMDes. Ketentuan tersebut, meskipun relative terlambat, kemudian diperkuat dalam regulasi teknis yang diterbitkan oleh Mendagri, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010, Pasal 2 Ayat (1). Akan tetapi, pada tataran implementasi, ketentuan yang diperintahkan dalam UU serta peraturan pemerintah, serta ketentuan teknis yang diatur melalui Permendagri tersebut masih belum sepenuhnya direspon secara optimal oleh pemerintah kota atau kabupaten. Hal ini ditandai dengan belum adanya Perda yang mengatur tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, atau jika Perda telah diterbitkan, sering kali belum mengacu pada Permendagri No. 39 Tahun 2010 yang baru ditetapkan setelah jeda waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut menyebabkan prosedur penguatan landasan hukum BUMDes kerap terhambat oleh persoalan legitimasi hukum BUMDes itu sendiri (Dewi, 2014). Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu membantu masyarakat desa dalam kesejahteraannya serta mampu membantu perekonomian desa. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagian besar kehidupan masyarakat di wilayah Jember khususnya desa Balung Kulon memiliki potensi yang unik yaitu pengelolaan sampah. Pemerintah desa Balung Kulon berharap masyarakatnya mampu mengembangkan potensi desa yang dimiliki salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi desa. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember Desa Balung Kulon.

2. Metode

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek penelitian yang akan dilaksanakan pada BUMDes Balung Kulon, Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif menekankan pada pengungkapan temuan penelitian yang tidak bersumber dari pengolahan data statistik maupun bentuk kuantifikasi lainnya (Moloeng, 2012).

Sementara paradigma penelitian yang digunakan yaitu Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang memberikan landasan dalam pemilihan pendekatan yang tepat, yaitu fenomenologi. Selanjutnya, tahap akhir diarahkan pada penentuan metode pengumpulan dan analisis data yang sesuai, yakni melalui wawancara penelitian yang berlandaskan pada pendekatan fenomenologis. Artinya, peneliti kualitatif yang berlandaskan fenomenologi memandang suatu peristiwa secara utuh dan tidak parsial, dengan menempatkannya dalam konteks sosial yang melingkapinya. Dasar fenomenologi berorientasi pada fenomena yang identik dapat ditarfsirkan secara berbeda bergantung pada konteks situasi yang melingkapinya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Balung Kulon, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dihimpun dari kegiatan wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Balung Kulon. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan BUMDes tahun 2020.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian, dengan metode yang digunakan berupa wawancara. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengkaji serta menyusun data secara terstruktur berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini dilakukan melalui pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, menguraikannya ke unit analisis, melakukan sintesis, serta menarik kesimpulan sehingga data mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain (Bambang, 2016: 71–72). Lebih lanjut, analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Biklen yang dikutip dalam Moleong (2012) merupakan proses yang dilakukan dengan pengolahan data secara langsung, mengorganisasikannya, memilah data ke dalam satuan yang dapat di proses, mensintesiskan, serta menyimpulkan pola dan makna yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes dibentuk melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA) desa diupayakan agar berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan penduduk desa setempat. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta mendorong pertumbuhan perekonomian desa, sehingga BUMDes dapat menjadi instrumen yang andal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di tingkat desa. Tujuan pendirian BUMDes yaitu, menyediakan layanan tata Kelola distribusi secara kolaboratif yang melibatkan Masyarakat Bersama pemerintah desa agar kebutuhan desa, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dapat terpenuhi. Sebagai sektor usaha desa yang berperan signifikan, BUMDes diupayakan tidak menimbulkan beban bagi Masyarakat dalam mengakselerasi perekonomian desa. Di sisi lain, BUMDes diharapkan mampu menerapkan kebijakan harga dan kualitas pelayanan yang adaptif terhadap kondisi serta berorientasi pada standar pasar, khususnya dalam memberikan layanan kepada pihak nonanggota atau masyarakat di luar desa. Pendirian BUMDes pada prinsipnya diselaraskan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki setiap desa. Hal tersebut sesuai yang dipaparkan oleh mbak Mia sebagai bagian akuntansi yaitu:

“untuk pendirian BUMDes dimulai sejak tahun 2016 mas, yang bertujuan nantinya bisa sebagai tempat untuk meningkatkan potensi desa mas sama membantu perekonomian masyarakat mas”

Berdasarkan hal tersebut pemerintah desa Balung Kulon berharap BUMDes tersebut nantinya semakin berkembang dan masyarakat sekitar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut supaya perekonomiannya sedikit terbantu.

Jenis Usaha BUMDes

1. Usaha Kerajinan

Unit usaha kerajinan ini bertujuan meningkatkan potensi-potensi skil masyarakat desa Balung Kulon dan dapat menjadi perekonomian desa menjadi meningkat. Unit usaha kerajinan ini proses produksinya dilakukan oleh pihak BUMDes dengan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar terkait model kerajinannya. Usaha kerajinan ini dinilai memiliki tingkat operasional yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan unit usaha lainnya, karena tidak memerlukan modal yang besar serta tidak menuntut kemampuan pemasaran yang kompleks. Selain itu, pelaksanaan usaha simpan pinjam berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses permodalan bagi warga desa. Pernyataan tersebut diperjelas oleh pernyataan bagian keuangan:

"untuk proses kerajinan ini mas proses produksinya dilakukan pihak BUMDes mas. Sementara untuk jenis kerajinan ada vandel, pigora dll. Hal ini mas nantinya dipasarkan lewat online supaya nantinya hasil karya BUMDes kita bisa dikenal oleh kalayak umum".

2. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah ini dimulai sejak tahun 2019 yang bertujuan untuk menampung para masyarakat yang memiliki sampah tidak perlu dijual jauh hanya cukup datang di BUMDes saja. Selain itu dengan adanya pengolahan sampah ini diharapkan para masyarakat mempunyai jiwa peduli lingkungan dan nantinya lingkungan menjadi terjaga. Unit pengelolaan sampah ini diharapkan menjadi salah satu produk unggulan BUMDes setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pengelahan sampah ini melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh BUMDes yaitu sampah dipilah sesuai jenis sampahnya, setelah itu dilakukan proses penggilingan dan menjadi butiran kecil. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan mbak Mia yaitu:

"dalam unit pengolahan sampah ini mas, nantinya sampah itu dipisahkan mas dan digolongkan sesuai jenisnya mas, setelah tergolong sesuai jenisnya baru digiling dan menjadi butiran kecil-kecil mas. Lha, butiran kecil itulah mas yang nantinya dijual di pabrik. Jadi BUMDes hanya melakukan sampai ke proses itu saja mas, tidak sampai ke produk jadinya".

3. Bank Sampah

BUMDes Balung Kulon memiliki Bank Sampah yang nantinya bank sampah tersebut menjadi pusat sektor sampah warga atau tempat jual sampah warga desa balung kulon tersebut. Sementara salah satu tujuan didirikan Bank Sampah ini berharap masyarakat Balung memiliki pemikiran yang terbuka dan kreatif, karena meskipun sampah itu dinilai hanya sebatas sampah tapi kalau dimanfaatkan bisa menjadi sangat berharga. Oleh karena itu sesuatu yang dianggap jelek belum tentu jelek, dari situlah yang menjadi misi atau harapan BUMDes Balung terhadap masyarakat.

Keunggulan dan Kelemahan BUMDes

Balung Kulon memiliki potensi yang cukup baik dibidang kerajinan yang dapat dimanfaat dan dikembangkan. Hasil kerajinan tersebut yang nantinya diharapkan sebagai langkah awal BUMDes dalam menjembatani masyarakat dalam mengembangkan keahlian dan ide kreatifnya. Menurut bagian keuangan, dengan adanya unit kerajinan ini diharapkan BUMDes Balung Kulon menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas atas karya-karyanya. Sumber daya desa yang dimiliki dapat dikelola serta ditingkatkan pemanfaatannya secara optimal melalui peran BUMDes agar lebih terorganisir, sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian desa. Sementara yang menjadi kelemahan sebelumnya BUMDes Balung Kulon sebelum tahun 2020 masih kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Tetapi semenjak tahun 2020 ini pelaporan keuangan yang dimiliki BUMDes Balung Kulon sudah lumayan bagus dan sudah terstruktur. Hal tersebut memudahkannya dalam proses penilaian kinerja dan proses evaluasinya demi perkembangan BUMDes kedepannya. Disamping itu juga diperjelas oleh pihak bagian keuangan yaitu:

"dulu ya mas, disini pelaporan keuangannya masih belum terstruktur mas dan masih sederhana banget mas. Tetapi mas semenjak saya kerja disini tahun 2020 alhamdulilah mas pihak BUMDes mendukung saya dan pelaporan keuangannya menjadi lebih terstruktur mas".

Laporan Keuangan				
Digital Akun	Ras	Buku Besar	Neraca Lajur	Neraca
Bank	Ruteng			Ruteng
Pembelian	Hutang			Laba Rugi
Pengeluaran	Asetva			Arus Kas-1
Memorial	Rakonelessi			Arus Kas-2

Gambar 1. Laporan Keuangan BUMDES

Sumber: 2020

Gambar 2. Laporan Keuangan BUMDes

Sumber: 2020

Tata Kelola BUMDes

BUMDes Balung Kulon terdiri atas beberapa unit usaha yang berbadan hukum, dengan kepemilikan modal yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. BUMDes dikelola secara terpisah dan tidak berada dalam struktur organisasi pemerintahan desa, serta masing-masing unit usaha memiliki susunan kepengurusan yang beroperasi secara independent tanpa adanya tumpeng tindih dengan unit usaha lainnya. Pihak kepala desa berperan sebagai penasihat BUMDes, kepala desa inilah yang nantinya mempunyai kewajiban tersendiri yaitu memberikan nasihat mengenai pengelolaan BUMDes serta operasionalnya BUMdes (Sulistyo, et.al, 2020). Selain itu tim penasihat yaitu pihak kepala desa juga dapat memberikan masukan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMdes serta diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan BUMdes. Untuk memjudkan good governance yang baik BUMDes harus mempunyai SDM yang handal dan berkompeten dibidangnya untuk melaksanakan operasional BUMDes (Wardayati, et.al, 2023).

Selain itu untuk meningkat tata kelola yang baik BUMDes harus mampu mengembangkan jenis usahanya atau bisa menambahkan jenis usaha baru. Sebagian besar jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes Balung Kulon lebih dominan di usaha kerajinan dan pengelolaan sampah, sehingga perlu adanya ide kreatif untuk jenis usaha baru. Kabupaten Jember memiliki beberapa potensi baik di pariwisata maupun makanan khas jember. Oleh karena itu, seharusnya BUMDes Balung Kulon bisa menambahkan jenis usaha baru baik itu sektor pariwisata maupun ke sektor makanan khas jember dikarenakan letaknya berdekatan dengan banyuwangi dan disitulah seharusnya menjadi ide kreatif untuk membuat jenis usaha baru.

Pengelolaan BUMDes harus memerlukan pengurus yang mempunyai jiwa idialisme yang kuat sehingga semua proses kegiatan dapat terlaksana secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan BUMDes diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip kerja sama, keterbukaan, partisipasi masyarakat, kesetaraan, akuntabilitas, serta keberlanjutan, dengan sistem keanggotaan dasar yang dijalankan secara mandiri serta dikelola secara profesional (Edy Yusuf et al., 2016).

Tetapi untuk transparansi BUMDes Balung Kulon masih belum bisa menerapkan secara detail, dikarenakan BUMDes Balung Kulon masih belum memiliki web tersendiri. Sehingga proses transparansi yang dilakukan BUMDes hanya bersifat internal saja. Hal tersebut diperielas oleh pernyataan dari bagian keuangan yaitu :

"mas, dalam proses transparansi BUMDes disini masih bersifat internal saja mas, dikarenakan belum mempunyai web sendiri. Tetapi kedepannya harapan kita semua mas, mampu menampilkan transparansi secara terbuka mas, supaya pihak masyarakat juga mengetahui bagaimana kinerja dari BUMDesnya".

Peranan BUMDes

BUMDes Balung Kulon telah melakukan beberapa usaha yang berkolaborasi dengan pihak masyarakat sekitar dalam memjudkan potensi desa yang dimiliki. Peranan tersebut sesuai dengan visis misa yang dimiliki oleh BUMDes Balung Kulon yaitu BUMDes sebagai badan usaha yang mampu menjadi peranan penting bagi masyarakat Balung Kulon dalam mengembangkan kesejahteraan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes tersebut sangat berperan aktif bagi desa setempat, yang awalnya masyarakat hanya pasif atas usaha nya sekarang para masyarakat sudah sedikit berubah mulai aktif dalam menciptakan ide-ide kreatifnya. Disamping itu dengan adanya BUMDes ini bisa masyarakat dalam membantu pemasaran produk-produk desa setempat dan membantu perekonomian masyarakat.

Tetapi BUMDes Balung Kulon hanya memprioritaskan Masyarakat asli Balung Kulon tersebut dalam pengembangan BUMDesnya. Prioritas tersebut bertujuan untuk mengangkat Masyarakat setempat dalam pengembangan kesejahteraanya. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Mbak Mia yaitu:

"memang ya mas prioritas kami pertama khusus masyarakat asli Balung dulu, karena apa, ini harapan kami supaya masyarakat sini bisa terangkat dulu kesejahteraanya mas dan nantinya masyarakat disini bisa lebih aktif dan mempunyai jiwa semangat untuk maju karena sudah difasilitasi BUMDes".

Berdasarkan misi yang dicanangkan oleh BUMDes tersebut menjadi poin tersendiri BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Disamping BUMDes juga berharap potensi-potensi desa bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Dengan dikenalnya potensi desa nantinya juga berdampak pada desa itu sendiri dalam meningkatkan penghasilan desa. Oleh karena itu semua perangkat desa, pengelola BUMDes maupun masyarakat setempat bersama-sama berusaha semaksimal mungkin memajukan perkembangan BUMDes supaya para masyarakat setempat kesejahteraanya meningkat. Hal tersebut sesuai dengan harapan yang dipaparkan oleh mbak Mia selaku bagian keuangan dan para pegawai BUMDes yairu :

"harapan kita semua ya mas, semoga dengan adanya BUMDes ini dapat menjadi perantara dalam memajukan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu harapan kami semua dengan fasilitas BUMDes ini masyarakat setempat mindsetnya bisa terbuka dan memiliki ide-ide kreatif. Dan yang terakhir ya mas, semoga BUMDes ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan berkembang mas, karena langkah demi langkah kami evaluasi kinerjanya dan mengaharapkan saran-saran para akademisi-akademisi, tenaga ahli (dosen) atau yang lainnya demi kemajuan BUMDes".

4. Kesimpulan

BUMDes Balung Kulon didirikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat kondisi perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi desa yang dimiliki. BUMDes Balung Kulon mengelola tiga unit usaha, yaitu unit usaha kerajinan, unit usaha bank sampah, dan unit usaha pengolahan sampah. Keberadaan unit-unit usaha tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, BUMDes Balung Kulon berperan sebagai wadah pemasaran produk-produk lokal desa, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Permasalahan-permasalahan yang dialami BUMDes adalah sebelum tahun 2020 tentang pelaporan keuangan yang masih sederhana dan belum sesuai teknik laporan keuangan sehingga kinerjanya belum optimal. Tetapi sejak 2020 pelaporan BUMDes tersebut sudah bagus dan terstruktur. Harapanya dengan pelaporan yang terstruktur ini dapat menjadi langkah awal BUMDes tersebut dalam perkembangannya. BUMDes juga berharap adanya masukan atau saran dari pihak-pihak luar baik itu akademisi ataupun tenaga ahli (dosen) demi kemajuan BUMDes tersebut.

Di era demokratisasi ini BUMDes diharapkan membawa dampak positif bagi desa dan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta potensi desa. Potensi desa itulah harus terus ditingkatkan dan terus dijaga karena menjadi sumber utama dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat desa. Optimalisasi perekonomian desa berperan dalam menciptakan legitimasi yang baik sehingga BUMDes dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa melalui upaya pengembangan potensi desa serta memperkuat perkembangan ekonomi desa secara merata.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang. JDEB, 13(1).
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 32-40.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.
- Dewi, A. S. K. (2014). Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development, V(1), 1-14.
- Kiki Srirejeki. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), 33-37.
- Mitchell, R.K., et al. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997): 853-886.

- Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115-131.
- Sulistyo, A.B., Wardayati, S.M., Hidayatullah, A., & Riesky, S.S.N. (2020). Effect of Islamic Corporate Governance on Customer Trust: Empirical Study on Islamic Bank. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 12-24.
- Wardayati, S.M., Hidayatullah, A., Fiqkri, M., Irwani, F.M., & Abdullah, N.A. (2023). Implementasi of Internal Control in Achieving Good Governance at Stellar Powerhouse Branch Jember. *International Social Sciences and Humanities*, 2(3), 1458-1463.
- Zulkarnain Ridlwan. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa. 8(3), 424–440.